



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
TAHUN 2024

Jalan Abdulrahman Saleh No.199
Kota Semarang
Telepon : 024-76439999



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

a. Informasi Umum BPR

Nama BPR : PT BPR Sinar Mitra Sejahtera
Alamat : Jalan Abdulrahman Saleh No.199, Kota Semarang
No.Telepon : 024-76439999

b. Penjelasan Umum

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang cukup baik pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif bagi BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum pulih. PT BPR Sinar Mitra Sejahtera berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Semarang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT BPR Sinar Mitra Sejahtera.

PT BPR Sinar Mitra Sejahtera telah beroperasi kurang lebih 9 tahun di kota Semarang dan akan senantiasa menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip- prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan.Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi bank yang sehat dan besar melalui keunggulan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR Sinar Mitra Sejahtera selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus BPR dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola:

| | |
|--|---------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 3. Cukup Baik |
|--|---------------|



Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

a. Nama : Suseno Pujo Santoso
Jabatan : Direktur Utama

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Memimpin dan mengarahkan seluruh operasional BPR untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan.
- 2) Menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan dan keberlanjutan BPR.
- 3) Mengawasi kinerja seluruh departemen dan memastikan koordinasi yang efektif antar unit.
- 4) Mengambil keputusan strategis terkait produk, layanan, ekspansi, dan investasi BPR.
- 5) Menyetujui kebijakan, prosedur, dan rencana kerja yang diajukan oleh manajemen di bawahnya.
- 6) Membangun dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder untuk mendukung reputasi dan pertumbuhan BPR.
- 7) Memastikan BPR mencapai target keuangan, termasuk pertumbuhan aset, profitabilitas, dan pengelolaan risiko.
- 8) Mengawasi penyusunan laporan keuangan dan memastikan akurasi serta transparansi dalam pelaporan.
- 9) Memastikan adanya sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko (kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas).
- 10) Mengawasi implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
- 11) Memastikan BPR mematuhi semua regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya.
- 12) Memimpin inisiatif pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan pasar.
- 13) Memastikan BPR memiliki tim yang kompeten dan profesional melalui rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karir.
- 14) Menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong kolaborasi antar departemen.
- 15) Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di seluruh level organisasi.



- 16) Memastikan BPR menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.
- 17) Mengevaluasi kinerja BPR secara berkala dan mengambil langkah- langkah perbaikan jika diperlukan.
- 18) Memimpin BPR dalam menghadapi situasi krisis atau darurat, seperti masalah likuiditas, penurunan kinerja, atau masalah reputasi.

b. Nama : Cornelly Lidwina Smith
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Memastikan Kepatuhan Regulasi.
- 2) Mengembangkan dan Mengimplementasikan Sistem Kepatuhan.
- 3) Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh aktivitas BPR untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.
- 4) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepatuhan kepada regulator (seperti OJK, PPATK, Pajak dll) secara berkala dan tepat waktu.
- 5) Mengorganisir pelatihan dan sosialisasi terkait kepatuhan bagi seluruh karyawan BPR.
- 6) Mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin dihadapi oleh BPR.
- 7) Bekerja sama dengan fungsi audit internal untuk memastikan bahwa proses kepatuhan berjalan efektif.
- 8) Memimpin atau mengawasi investigasi atas dugaan pelanggaran kepatuhan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
- 9) Mengembangkan dan memperbarui kebijakan, prosedur, dan pedoman kepatuhan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan BPR.
- 10) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut diimplementasikan secara konsisten di seluruh unit kerja.
- 11) Bekerja sama dengan unit lain di BPR, seperti manajemen risiko, operasional, keuangan, dan hukum, untuk memastikan integrasi kepatuhan dalam seluruh aktivitas bank.
- 12) Memastikan bahwa fungsi kepatuhan mendukung tujuan bisnis BPR tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi.
- 13) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem kepatuhan dan mengusulkan perbaikan jika diperlukan.
- 14) Memastikan bahwa BPR selalu siap menghadapi audit eksternal dari regulator.
- 15) Memastikan bahwa BPR tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- 16) Mengawasi implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sesuai dengan prinsip kepatuhan.



- 17) Mewakili BPR dalam forum atau pertemuan yang berkaitan dengan kepatuhan dan regulasi perbankan.
- 18) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi terkait isu- isu kepatuhan.
- 19) Melakukan opini kepatuhan dan management risiko atas kegiatan perbankan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Meningkatkan penjualan AYDA
2. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah.
3. Menjaga Cash Ratio atau Likuiditas untuk tetap Sehat.
4. Menjaga KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- a. Nama : Bernardus Dwisampurno
Jabatan : Komisaris

Penjelasan Tugas Dan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- 2) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank serta pelaksanaan tata Kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- 4) Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/ atau diberikan kepada Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 5) Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- 6) Memastikan Bank tidak memanfaatkan dan/ atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- 7) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- 8) Mengajukan calon KAP dan/atau AP kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran



peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 10) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi dan melakukan evaluasi berkala Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan.
- 11) Dewan Komisaris wajib menyusun Kebijakan penilaian sendiri dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris.
- 12) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Meningkatkan penjualan AYDA
 2. Meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah
 3. Menjaga Cash Ratio / Likuiditas untuk tetap Sehat.
 4. Menjaga KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite.
 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite BPR belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite.
 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | 0,00 |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Bernardus Dwisampurno | 0,00 |

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR
 - Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Kelompok Usaha BPRKepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR
 - Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Saham pada Kelompok Usaha BPR



Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR pada Kelompok Usaha BPR

| No. | Nama | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%) |
|-----|-------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Anna Yesito Wibowo | 10,88 | 10,88 |
| 2. | Agus Antariksa Sidharta | 2,17 | 2,17 |

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama | Nama Bank/ Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan(%) |
|-----|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | 0,00 |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama | Nama Bank/ Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan(%) |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | 0,00 |

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|-----------------------|--|--|---|
| 1. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |



10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 1. | Suseno Pujo Santoso | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Cornelly Lidwina Smith | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR |
|-----|-----------------------|--|--|---|
| 1. | Bernardus Dwisampurno | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR tidak memiliki hubungan keluarga.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

a. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|-----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | : 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | : Rp312.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | : 1 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | : Rp42.000.000 |

b. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | : 2 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj. Direksi (Rp) | : Rp78.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | : 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj. Komisaris (Rp) | : Rp.0 |

c. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|-----------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | : 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | : Rp.0 |



- Jumlah Komisaris Penerima Tantiem : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) : Rp.0
- d. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Kompensasi Berbasis Saham : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Direksi (Rp) : Rp.0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi Berbasis Saham : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi Berbasis Saham Komisaris (Rp) : Rp.0
- e. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya : 2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) : Rp36.900.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya : 1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) : Rp3.500.000
- f. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Perumahan : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Perumahan Direksi (Rp) : Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunj.Komisaris (Rp) : Rp.0
- g. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Transportasi : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Direksi (Rp) : Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi : 0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Transportasi Komisaris (Rp) : Rp.0
- h. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan : 2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) : Rp5.020.780
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan : 0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) : Rp.0
- i. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-lainnya : 0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-lainnya Direksi (Rp) : Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-lainnya : 0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-lainnya Komisaris (Rp) : Rp.0

Catatan :

Seluruh Anggota Direksi diberikan fasilitas Mobil Dinas sekaligus juga digunakan untuk Mobil Operasional Kantor.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah : 2,23 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah : 2,23 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah : 1,00 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi : 7,28 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi : 3,53 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Selama tahun 2024 Anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang sehingga Rapat Dewan Komisaris belum dapat dilaksanakan, namun Anggota Dewan Komisaris telah melakukan rapat bersama Direksi selama tahun 2024 sebanyak 5 kali pertemuan yang dilaksanakan secara tatap muka.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 Anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu) orang sehingga Rapat Dewan Komisaris belum dapat dilaksanakan, namun Anggota Dewan Komisaris telah melakukan rapat bersama Direksi selama tahun 2024 sebanyak 5 kali pertemuan yang dilaksanakan secara tatap muka.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

| | |
|--|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: | : 0 kasus |
2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

| | |
|---|-----------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | : 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | : 0 kasus |



- Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
- Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: 0 kasus
- 3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap
 - Total Fraud Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: 0 kasus
- 4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap
 - Total Fraud Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan : 0 kasus
 - Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya : 0 kasus
 - Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan: 0 kasus

Catatan :

Selama tahun 2024 tidak terjadi penyimpangan internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai BPR.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

- Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai : 5 kasus
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
- Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai : 0 kasus
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

- Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian : 12 kasus
- Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian : 5 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

- Selama tahun 2024 tidak terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan



18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Penerima Dana | Penjelasan Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|-----------------|----------------------------|--|-------------|
| 1. | 15-02-2024 | Kegiatan Sosial | Perbarindo DPD Jawa Tengah | Peduli Bencana Banjir Perbarindo | 1.000.000 |
| 2. | 21-03-2024 | Kegiatan Sosial | Perbarindo DPD Jawa Tengah | Peduli Bencana Banjir di Demak | 500.000 |
| 3. | 06-05-2024 | Kegiatan Sosial | Panti Asuhan Anugerah | Pemberian Sembako ke Panti Asurah Anugerah | 650.000 |
| 4. | 03-07-2024 | Kegiatan Sosial | Kelurahan Kembangarum | Sumbangan untuk Kegiatan HUT RI Ke 79 dan Tahun Baru Islam 1446 H di Kelurahan Kembangarum | 200.000 |

Semarang, 21 April 2025

PT BPR Sinar Mitra Sejahtera,

Suseno Pujo Santoso
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera

Bernardus Dwisampurno
Komisaris



KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Nama BPR : PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No.199, Kota Semarang
Nomor Telepon : 024-76637101 / 024-76439999
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp14.747.086.171
Total Aset : Rp109.951.877.736

| No. | Kriteria / Indikator | Nilai Faktor |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1. | Aspek Pemegang Saham | Nilai 2 (Memadai) |
| 2. | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| 3. | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris | Nilai 4 (Kurang Memadai) |
| 4. | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | Tidak Dinilai |
| 5. | Penanganan Benturan Kepentingan | Nilai 2 (Memadai) |
| 6. | Penerapan Fungsi Kepatuhan | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| 7. | Penerapan Fungsi Audit Intern | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| 8. | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | Nilai 2 (Memadai) |
| 9. | Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| 10. | Batas Maksimum Pemberian Kredit | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| 11. | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi | Nilai 2 (Memadai) |
| 12. | Rencana Bisnis BPR | Nilai 3 (Cukup Memadai) |
| Peringkat Komposit | | 3 |
| Predikat Komposit | | Cukup Baik |

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.



Faktor Positif

A. Struktur dan Infrastruktur

1. Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
5. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Proses

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai.
2. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai cukup memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai cukup memadai.
4. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah memadai.
5. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan cukup memadai.
6. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.



7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan cukup memadai.
9. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan cukup memadai.
10. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
11. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR tergolong cukup memadai.

C. Faktor Positif Hasil

1. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham hasil penerapan tata Kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian cukup memadai.
3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian cukup memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai cukup memadai.
6. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai cukup memadai.
9. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR adalah memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai cukup memadai.



Faktor Negatif

A. Struktur dan Infrastruktur

1. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, BPR tergolong masih terpenuhi Sebagian.

B. Proses

1. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, (2) Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, yaitu Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, berjalan dengan masih kurang memadai.

C. Hasil

1. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi kurang memadai, yang dapat dilihat dari penurunan kinerja individu, penurunan kinerja BPR, belum optimalnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil tidak sesuai dengan ekspektasi stakeholders.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris kurang memadai yang dapat dilihat dari Dewan Komisaris belum menyusun Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Semarang, 15 Januari 2025

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera

Suseno Pujo Santoso
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera

Bernardus Dwisampurno
Komisaris